

JURNAL

Kajian Strategik dan Global

Perpres No. 20/2018 dan Nasionalisme di Era Post-Truth

Puspitasari⁵

mipuspita@gmail.com

Abstract

This paper describes post-truth phenomena characterized by hoaxes that present in the community through social media and online media. This change of tendency is a logical consequence of the situation faced in the mass media industry and is reinforced by the tendency to strengthen politics of identity. This paper highlights how the Presidential Decree (Perpres) no. 20/2018 raises contestation that threatens national resilience through a segregation situation.

Keywords: post-truth, hoax, binary opposition, online and social media, Keppres No. 20/2018

Copyright © 2018 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved

⁵ Dosen Tetap Kajian Strategik Ketahanan Nasional, SKSG Universitas Indonesia

Pendahuluan

Setelah Indonesia dibuat terhenyak dengan ditangkapnya kelompok Saracen, belakangan Polri menangkap jaringan lain yang memiliki kemiripan secara operasional, yaitu memintal dan menenun berita bohong (*fake news*). Kelompok itu menamai diri sebagai *Muslim Cyber Army*.

Fenomena memintal dan menenun kabar bohong menjadi fenomena yang semakin hari semakin menjadi pasokan “nutrisi” dalam arus informasi yang didistribusikan media dewasa ini. Dan masyarakat dalam era globalisasi mengonsumsi informasi dalam kategori berita bohong melalui media baru, baik media daring (*online*) dan media sosial.

Pada saat yang bersamaan, sebagaimana ditengarai bahwa dewasa ini berkembang situasi dimana masyarakat cenderung menginterpretasikan realitas ke dalam oposisi biner: atau A atau B (Puspitasari, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan pada November 2017 tersebut dijelaskan bahwa situasi kategoristik itu setidaknya mewarnai peristiwa Pilkada DKI periode 2017, dan berimplikasi pada perubahan pemaknaan dan relasi antar dan intra-umat beragama di kalangan masyarakat Jakarta, dan bahkan memengaruhi sebagian masyarakat Indonesia ke dalam gelombang narasi yang kategoristik (2018).

Menarik mencermati bagaimana arus informasi yang berkembang dewasa ini semakin menanggalkan kebutuhan akan nalar, validitas data dan kredibilitas sumber informasi. Bersamaan dengan situasi penyebaran berita bohong yang semakin massif, dan meluas dalam berbagai aspek, mulai dari bidang politik, sosio-kultural, kesehatan, ekonomi dsb.

Salah satu pihak yang dapat disebut bertanggung jawab untuk terjadinya pergeseran paradigma ini adalah perkembangan dalam dunia media massa itu sendiri. Pertama adalah dari sisi media massa konvensional itu sendiri, kedua dari sisi perkembangan teknologi komunikasi yang

meletakkan media daring dan media sosial sebagai salah satu sentra informasi bagi masyarakat. Ketiga tentu terkait dengan persoalan yang lebih luas, yang dapat ditarik pada isu nasionalisme.

Perkembangan arus informasi dalam kaitannya dengan media massa mengalami perubahan yang dramatis, salah satunya ditandai dengan peristiwa 11 September 2001. Sejumlah tulisan menunjukkan titik awal argumentasi yang menempatkan situasi sebagaimana terlihat pada masa sekarang.

Salah satu diantaranya berbagai isu yang kemudian dapat ditarik pada konsep nasionalisme adalah isu tenaga kerja asing dalam konteks pasca ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Mereka yang mendukung Perpres tersebut beragumen bahwa Perpres itu dapat merangsang minat investasi dari luar negeri. Sementara itu terdapat pihak yang justru menilai bahwa Perpres tersebut dapat berakibat pada meningkatnya serbuan pekerja asing ke dalam negeri terutama dari Tiongkok mengingat banyak proyek infrastruktur dewasa ini yang dibantu pembiayaannya oleh pemerintah dan investor dari Tiongkok (Pitoko, 2018).

Kehadiran Perpres No. 20/2018 menimbulkan pro kontra dan berimplikasi pada hal melalui ragam suara yang muncul dalam media sosial. Ragam suara itu kemudian berkontribusi pada terbentuknya hal dalam konteks kebangsaan.

Nasionalisme: Quo Vadis?

Dalam perjalanan panjang sebagai negara yang memiliki ciri kemajemukan baik dari segi etnis, kedaerahan, maupun agama, para Bapak Bangsa termasuk Soekarno dan sejumlah tokoh nasional secara sadar membuat rumusan tentang Indonesia yang plural, yang majemuk.

Dalam sudut pandang Sukarno, Kemajemukan dipandang sebagai sebuah kekayaan yang perlu disatukan. Lebih lanjut Soekarno menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa yang dapat menjadi perekat pemersatu yang mengatasi etnis dan agama di Indonesia (Adams, 2011: 83-87).

Meskipun mengakui bahwa kemajemukan merupakan sumber yang berharga, Soekarno juga menyadari bahwa kemajemukan bangsa ini berpotensi untuk terpecah belah. Berangkat dari kesadaran itulah, Sukarno memunculkan ide bahwa Bahasa Indonesia dapat difungsikan bukan hanya sebagai bahasa yang menjembatani komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat, melainkan juga sebagai fungsi kohesi sosial, merujuk pada istilah yang digunakan oleh Emile R. Durkheim.

Kesadaran Sukarno tentang potensi keterpecahan itu juga dinyatakan oleh salah seorang ilmuwan, Furnivall yang mengatakan bahwa bangsa yang majemuk seperti Indonesia memiliki kecenderungan untuk menghancurkan dan tidak mengonsolidasi tata tertib sosialnya (Kahin, 1995: 78).

Baik Sukarno maupun Furnivall samasama memiliki sudut pandang yang menilai kemajemukan sebagai potensi ancaman bagi nasionalisme, kemajemukan juga dibaca sekaligus sebagai berkah dan sumber masalah. Dan konflik kerap kali diawali oleh pandangan etnosentrisme yang beranggapan bahwa kelompoknyalah yang paling unggul dan menjadi pusat dari kelompok lainnya.

Pandangan Sukarno terkait dengan bahwa bahasa merupakan pemersatu, setidaknya mencatatkan tiga data penting mengenai nasionalisme, pertama ada kesadaran bahwa bangsa kita memiliki ciri kemajemukan, kedua bahwa kesadaran tentang perbedaan itu dapat menjadi sumber ancaman dan ketiga perlu ada perekat yang mempertalikan dan mengikat masyarakat yang berbeda tadi dalam satu

kesatuan (Puspitasari, 2012; Kahin, 1995; Ricklefs, 2010; Parakitri, 2001).

Dan nasionalisme sebagai sebuah proyek nasional dan jangka panjang, menurut Ben Anderson tidak perlu bersandar pada dimensi tatap muka atau interaksi yang bersifat langsung, melainkan bisa dimediasi. Proses mediasi itu dimungkinkan sejauh ada tautan kesamaan kepentingan atau mengidentifikasi sebagai satu bagian dari bangsa yang sama (Anderson dalam Puspitasari, 2012).

Dengan demikian perkembangan nasionalisme menjadi sangat mungkin dimediasi melalui kehadiran media massa, baik yang konvensional maupun berbasis daring, dan bahkan media sosial. Dan nasionalisme kemudian memunculkan wajahnya yang beraneka, tidak hanya ditandai oleh satu wajah yang seragam, dengan satu bahasa, satu kepentingan bersama, melainkan diwarnai dengan keragaman identitas.

Media: Dilema Kebebasan Berekspresi

Dalam membahas media berkaitan dengan isu nasionalisme, setidaknya terdapat dua fakta menarik, yaitu pertama perkembangan media massa nasional yang mengalami perubahan pasca Reformasi 1998. Dan kedua adalah peristiwa 11 September 2001 yang mengguncang kesadaran masyarakat dunia akan kehadiran terorisme yang ternyata berkontribusi pada perubahan paradigma dalam menyajikan berita dan informasi pada media massa di Amerika Serikat.

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa Reformasi 1998 membawa konsekuensi pada perubahan lanskap media massa di Indonesia yang diwarnai dengan semangat kebebasan berekspresi. dengan diberlakukannya UU Pers pada tahun 1999. Setelah sebelumnya, pada masa pemerintahan Suharto, media mengalami kontrol yang ketat, sebagaimana dijelaskan oleh Woodier (Cole, 2006, p. 41). Meskipun pasca Reformasi, tidak berarti bahwa media sepenuhnya bebas, karena Woodier mencatat

bahwa Bambang Harymurti, editor mingguan berita Tempo bahkan divonis bersalah dan mendapatkan sanksi penjara selama satu tahun akibat memberitakan pengusaha Tomy Winata memiliki keheranan hubungan dengan Suharto dan militer (Cole, 2006, p. 41).

Reformasi tidak hanya membawa perubahan dalam kebebasan media melainkan juga pada perkembangan industri media massa yang memengaruhi munculnya ruang publik dan meningkatnya partisipasi sosial di kalangan masyarakat sipil.

Kehadiran teknologi komunikasi memungkinkan media baru seperti media daring (online media) dan media sosial menjadi medium yang secara revolusioner mengisi peran partisipasi publik sebagai saingan atau pelengkap informasi yang semula secara monopolistik dipegang oleh media konvensional, seperti koran, majalah dan televisi.

Merujuk pada sejarah, kehadiran media baru pada mulanya diawali oleh kehadiran teknologi internet di Indonesia, yang pada pertengahan tahun 1990an dimulai dengan surat elektronik (*e-mail*) dan pembentukan *mailinglist*. Dalam penelitian David T. Hill dan Krishna Sen (2005) internet memberi kontribusi pada proses demokratisasi terutama dalam mendorong era keterbukaan politik yang selama masa pemerintahan Soeharto dicekam oleh gaya otoritarian.

Kehadiran internet di Indonesia memunculkan suasana keterbukaan dan euforia demokrasi, sehingga tidak mengherankan jika dalam perkembangan teknologi informasi dengan beragam platform media sosial, memunculkan konsekuensi yang mirip, yaitu suasana keterbukaan dan kebebasan, yang menjadi ciri demokrasi.

Dua presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo menyadari perubahan arus kebebasan informasi dan perkembangan teknologi informasi serta pengaruhnya pada peningkatan partisipasi

masyarakat dalam ruang publik. Kesadaran itu mendorong mereka memanfaatkan keberadaan media sosial secara signifikan. Media sosial memberi kontribusi pada upaya mobilisasi dukungan politik dari masyarakat. Selain itu juga menjadi ruang dimana kedua tokoh ini dapat menggali *feedback* terkait dengan hal-hal apa yang menjadi kegelisahan atau bahkan harapan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah.

Meski menyadari sifat dari media sosial yang memiliki *interactivity* yang tinggi dan kesegeraan dalam merespons yang cepat dan berimplikasi pada dukungan publik pada mereka, hal tersebut tidak menyurutkan langkah kedua tokoh ini dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dengan masyarakat luas.

Akan tetapi pada satu titik, kegelisahan mereka pada geliat media sosial yang menyuarakan berita bohong, dan bahkan sumpah serapah atas kebijakan yang diselenggarakan, membuat Yudhoyono maupun Widodo sempat menyuarakan protes mereka. Protes yang diajukan karena menilai bahwa wajah media sosial tidak ramah, bahkan disebutkan oleh Yudhoyono “terjadi surplus kebebasan dan defisit kepatuhan” (2014), sementara Widodo merumuskan bahwa yang terjadi dewasa ini adalah demokrasi kebablasan (Februari 2017).

Media Massa Konvensional Kehilangan Relevansi di Mata Masyarakat?

Sebagaimana disinggung di atas bahwa berita bohong di tengah bangsa ini bahkan berkembang menjadi suatu proyek, yang bukan hanya proyek sosial, melainkan juga proyek politik, dan di balik proyek tersebut ditengarai ada kepentingan ekonomi yang bertalian dengan proyek pembohongan pada masyarakat.

Ramai dibicarakan bahwa berita bohong atau disebut sebagai hoaks merupakan suatu isu yang dapat mengancam ketahanan nasional karena pengaruhnya pada terbentuknya segregasi dan fragmentasi di tengah masyarakat. Berhadapan dengan isu hoaks yang dewasa ini

menyeruak, menarik mencermati perkembangan media selama kurun waktu belakangan ini. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari situasi ini, pertama apakah media massa konvensional berkat perkembangan teknologi komunikasi menjadi kehilangan relevansinya pada penyebaran informasi sehingga membuat masyarakat cenderung mencari informasi melalui media baru? Atau situasi itu terjadi akibat yang muncul sebagai konsekuensi dari tindakan sosial dari media massa konvensional sehingga membuat masyarakat beralih pada media sosial?

Toby Miller memberikan penjelasan bahwa sangat mungkin media massa konvensional memiliki kontribusi pada berubahnya pilihan masyarakat pada media sosial yang dianggap sebagai media alternatif. Miller menjelaskan bahwa pasca peristiwa 9/11 yang mengguncang benak kesadaran masyarakat dunia, media massa mengalami transformasi dalam cara mereka menyajikan realitas ke hadapan audiens (Cole, 2006, p.5). Media, setidaknya media Amerika Serikat menjadikan momentum itu sebagai titik balik untuk memunculkan gagasan tentang nasionalisme. Media bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membangkitkan sentimen nasionalisme.

Dengan demikian, media massa di sini, menjadi media propagandis yang dalam upayanya meneriakkan ide nasionalisme demi mempersatukan hati bangsa yang retak pasca 9/11 justru mengabaikan beberapa topik kunci yang relevan untuk dikritisi dengan memperhitungkan unsur geopolitik pada masa itu, yaitu Zionisme, Afganistan pasca invasi, kebijakan luar negeri Amerika dan kepentingan bisnis Amerika di Timur Tengah.

Media di satu sisi mengalami kegagalan dalam memberitakan terorisme. Peristiwa 9/11 tahun 2001 semacam membuka kesadaran akan ketidaksiapan tersebut. Ketika India, Yunani dan Colombia pada 1999 mengalami serangan terorisme, media massa sama sekali abai dan

tidak memberitakan hal tersebut (Cole, 2006, p. 17).

Akan tetapi pilihan media untuk tidak membeitakan bukan tanpa sebab, karena pada saat itu, isu terorisme belum menjadi satu hal yang dianggap memiliki nilai berita. Sebagai industri, media massa selalu menjadikan dasar dari pemberitaannya adalah demi keberlangsungan sebagai industri yang perlu memikirkan keuntungan sebagai orientasi. Dengan demikian media selalu mempertimbangkan aspek perlu memilih berita yang laik, atau memiliki nilai berita (*newsworthiness*). Bahkan jika suatu hal memiliki aspek sensasi maka hal tersebut akan memiliki kemungkinan untuk dimuat daripada hal lainnya.

Miller menjelaskan lebih lanjut bahwa New York Times pada masa itu secara intelektual belum siap untuk menyajikan laporan tentang terorisme, karena sampai pada tahun 2001, isu terorisme merupakan isu yang ada di luar Amerika. Bukan isu yang memiliki nilai layak muat (*newsworthy*).

Media Amerika pasca 9/11 mendadak dihadapkan pada keniscayaan untuk mengubah tampilan dan caranya dalam menyajikan realitas. Kategorisasi mulai pelan-pelan dibangun dalam konteks nasionalisme, kategorisasi berada dalam *nation*, atau di luar *nation*.

Proses kategorisasi itu kemudian dengan mudah menyebar dan ketakutan tentang radikalisme dan terorisme menjadi salah satu yang dijalankan oleh media massa, Dan ketika proses itu terjadi, maka akan ada yang diposisikan sebagai pahlawan-pahlawan (*heroes*), dan selebihnya ditempatkan sebagai penjahat-penjahat (*villains*).

Post-Truth: Media pada Masa Kini

Kita kembali pada isu yang dimunculkan pada awal tulisan ini, terkait dengan pintal dan tenunan berita yang sedemikian rupa dilakukan dengan dasar kepentingan tertentu. Ada apa

dengan arus kebebasan informasi pada masa yang ditandai dengan fenomena *Post-Truth*?

Sebagaimana disinggung di atas oleh Miller (2006, p. 17) bahwa ada persoalan dimana media cenderung selektif dalam menyajikan berita yang didasari oleh aspek layak muat (*newsworthiness*), sehingga berita yang tampil menjadi terkesan menjemukan dan merepresentasi kepentingan tertentu, baik kepentingan politisi, ataupun kepentingan sensasional.

Situasi ini menjadi semacam pendasaran bagi jenuhnya masyarakat akan limpahan informasi yang mengalir dari media massa konvensional. Selain itu, pada saat yang kurang lebih bersamaan, muncul penguatan kecenderungan menguatnya tendensi *ingrouping* sejalan dengan memuatnya politik identitas..

Dalam konteks ini, media sosial memenuhi kebutuhan akan informasi yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianutnya. Sejumlah atribut sosial dilekatkan pada kelompok dan menguatkan identitas sosial pada kelompok-kelompok, mereka yang memiliki atribut yang memiliki kelekatan, baik secara *sense of belonging* atau afiliasi dengan suatu budaya (atau sub-budaya) tertentu (TingToomey dan Chung, 2011).

Maka, media baru baik media daring maupun media sosial tertentu dipilih dengan kesadaran bahwa melalui media tersebut mereka membangun rasa *in-group* yang kuat. Proses berbagi nilai secara simbolik menunjukkan afiliasi pada dasar kepentingan yang sama. Dan, mereka yang tidak memiliki afiliasi simbolik yang serupa akan dikategorikan sebagai *out-group*.

Dalam penelitian yang diselenggarakan pada isu sentral dalam kurun waktu 27 April hingga 19 Mei 2018, yaitu Perpres TKA No. 20/2018 yang dikaitkan dengan Pilpres 2019, ditemukan bahwa isu yang diangkat memunculkan implikasi yang menunjukkan pemihakan.

Kecenderungan pada pandangan masyarakat yang terbelah secara kategoristik menguat berkat adanya hoaks yang menyebar secara viral dan dalam waktu yang pendek dan segera menjangkau audiens yang luas.

Jika pada Pilkada 2017, kategorisasi yang terbangun adalah antara kubu Basuki Tjahja Purnama versus Anies Baswedan yang kemudian menggumpal dalam warna berbasis etnis dan agama dan berlanjut ketika Anies Baswedan dalam pidato perdananya sebagai gubernur memunculkan wacana yang menjadi problematik dan kontroversial, yaitu “pribumi”. (Puspitasari, 2018).

Sejumlah informasi yang beredar dalam akun media sosial mengindikasikan adanya kategorisasi yang dibangun dengan sengaja. Dalam konteks ini penelitian ingin menunjukkan apakah akun tersebut menyebarkan kebohongan-kebohongan yang secara sistematis dikembangkan dengan sengaja.

Merujuk pada Levi-Strauss bahwa manusia memiliki kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis terutama dalam kemampuan untuk menstruktur (*structuring*) pada gejala-gejala yang dihadapinya (Eriyanto, 2013, p. 165). Struktur yang ada dalam narasi oleh Levi-Strauss disebut sebagai strukturstruktur permukaan. Struktur permukaan merupakan struktur yang disadari oleh penuturnya, yang menggambarkan sesuatu yang ada dalam struktur dalam (*deep structure*). Struktur dalam merupakan yang ada di balik berbagai narasi atau cerita.

Membaca Levi-Strauss bahwa kemampuan manusia menstrukturkan narasi bersifat genetis, terasa seperti membaca kembali Kahin dan Parakitri yang menjelaskan bahwa perbedaan perlakuan pada kelas-kelas (yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda) membawa masyarakat untuk menempatkan manusia lain dalam kelompok yang berbeda sebagai liyan (Puspitasari, 2012, p. 4).

Dengan demikian seluruh bentuk narasi yang terjadi pada masa sekarang ini sesungguhnya merupakan bagian proses pewarisan sosial, atau konstruksi sosial yang dilanggengkan oleh institusi-institusi sosial yang ada, baik institusi keluarga, sekolah, kampus, agama, politik dan ekonomi lainnya, secara sadar dan kolektif. Membaca akun *twitter* sama dengan membaca proses konstruksi sosial yang terjadi. Melalui akun *twitter*, masyarakat masuk dalam proses konstruksi sosial yang terjadi, dan dilibatkan dalam proses eksternalisasi dari penulis akun yang berupaya menginternalisasikan gagasannya kepada jaringan sosial yang dimilikinya.

Mengapa *posting* dalam media sosial dianggap sebagai narasi? Narasi menurut Herman dan Vervaeck dalam Eriyanto (2013, p. 2) memiliki karakteristik pertama, adanya rangkaian peristiwa. Menggunakan satu kerangka isu secara sistematis dan terorganisasi menjadi dasar dalam mengklasifikasikan *posting* di media sosial sebagai narasi.

Ciri kedua adalah bahwa rangkaian peristiwa tersebut tidak bersifat acak, melainkan merujuk pada logika tertentu, baik dari secara kausalitas maupun kronologis, sehingga menunjukkan kaitan secara logis (Eriyanto, 2013, p. 2). Dan ketiga, terdapat proses pemilihan dan menghilangkan bagian tertentu dari peristiwa sebagaimana terlihat dalam proses penyusunan kalimat yang secara spesifik memilih isu tertentu untuk dikembangkan dan menghilangkan bagian tertentu, sebagai bagian dari strategi membangun oposisi biner menurut Levi-Strauss.

Sebagai sebuah teks sosial, semua istilah yang digunakan tidak pernah dinilai netral. Sebagaimana disinggung dalam penelitian Haryanto (2015) pembagian kelas sosial yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda membangun dan masyarakat. dan ini berimplikasi pada bentuk interaksi sosial di

antara kelompok-kelompok yang ada (Haryanto, 2015, p. 1-2) yang cenderung asimetris.

Posisi diametral yang diwarnai dengan prasangka kepada pemerintahan yang berkuasa juga menjadi ciri khas yang kuat pada masa pemerintahan Suharto. Bahkan Reformasi Mei 1998 ditandai oleh sejarah sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritarianisme pemerintahan Suharto (Beerkens, 2008; Mydans, 1998). Disebutkan oleh Beerkens dan Mydans bahwa kejatuhan Suharto diawali dengan terjadinya krisis ekonomi yang secara dramatis menghadirkan nestapa yang panjang, ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan yang menguat.

Persis pada masa sekarang, mulai sejumlah masalah sosial menggejala di Indonesia mulai dari isu pelambatan ekonomi, diberlakukannya Perpres No. 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Keluarnya Perpres ini yang ditengarai sejumlah pihak memberikan peluang bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dan merebut lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi tenaga kerja domestik.

Pada waktu yang bersamaan isu ini menguat justru karena munculnya sejumlah pengangguran baru akibat perkembangan bisnis ritel yang melesu. Perkembangan bisnis ritel yang melesu ditengarai sebagai akibat dari perpindahan konsumsi masyarakat yang semula konvensional beralih pada konsumsi melalui media daring.

Tidak hanya itu, pelambatan ekonomi yang terjadi kemudian disangkutkan dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2019, sehingga menguatkan kesan terjadinya dinamika kontestasi yang ingin mengulang kembali Reformasi 1998. Tidak dapat dipungkiri, akumulasi isu ini berkelindan satu dengan yang lain sehingga menjadi momentum yang dimanfaatkan untuk menggunakan kebebasan arus informasi sebagai kendaraan politis untuk memunculkan sentimen kepada pemerintahan dengan menghadirkan kategorisasi yang kuat dalam media baru.

Kebebasan arus informasi menjadi sebuah keniscayaan yang menghadirkan oposisi biner. Oposisi biner menjadi suatu realitas yang dihadirkan dalam media sosial.

Konstruksi oposisi biner merepresentasikan struktur dalam yang secara historis menunjukkan wajah kategorisasi yang mendalam dan berpotensi mengarahkan keterpecahan bangsa.

Konstruksi oposisi biner yang dibangun tanpa sadar menggeliat dalam ruang media sosial dan secara diametral membangun relasi biner yang tidak seimbang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: [1] Pengetahuan, makna dan nilai mengenai teks tenaga kerja asing dalam kaitannya dengan Pilpres 2019 yang diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat? [2] Narasi tentang dunia sosial dan politik di balik teks tentang tenaga kerja asing, dan [3] Gambaran laten dari teks dalam akun twitter.

Kerangka Teoretis

1. Konstruksi Sosial dalam Pemberitaan

Gaye Tuchman, dalam Severin dan Tankard (2005, p.400), menjelaskan bahwa berita merupakan konstruksi realitas sosial. Tindakan membuat berita adalah tindakan mengonstruksikan realita itu sendiri. Berita menjadi sekutu bagi lembaga-lembaga yang berlegitimasi dan bahwa berita juga melegitimasi status quo.

Narasi yang muncul dalam media sosial menjadi alat untuk membangun konformitas dalam proses membangun (politik) identitas melalui *in-grouping*. Melalui narasi tersebut, komentar dan *share* serta jumlah *follower* yang tinggi menjadi alat untuk melegitimasi “suara kebenaran” dengan menegaskan *liyan*. Dengan demikian *posting* pesan tersebut menjadi alat melegitimasi *status quo* yang menjadi sumber daya informasi yang didistribusikan secara sosial melalui viral di media sosial.

Alex Sobur (2001, pp.166-167), mengatakan bahwa pada dasarnya dalam merekonstruksi suatu realitas, wartawan cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skemata interpretasi (*schemata of interpretation*), maka hal serupa dilakukan oleh para warganet (*netizen*) yang mengungkapkan narasi didasari pengetahuan yang sudah mengkristal.

Lanjut Sobur (2001, p. 167), dengan skemata ini, wartawan cenderung membatasi atau menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber berita, serta memberi porsi yang berbeda terhadap tafsir atau perspektif yang muncul dalam wacana media. Warganet juga mendistribusikan narasi melakukan proses seleksi informasi dan menafsirkan sesuai dengan skema interpretasi yang dimilikinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan bagaimana realitas yang diteliti dipahami secara menyeluruh. Studi ini tidak berangkat dari upaya untuk meyakini “kebenaran” dalam narasi yang dikaji karena didasari pemahaman bahwa kebenaran memiliki tidak hanya satu versi untuk mengungkapkan dirinya (Stake dalam Creswell, 2015, p. 71). Penelitian ini merujuk pada Creswell yang berusaha agar pembahasan dalam penelitian memiliki resonansi dan menjadi refleksi yang akurat dari data yang disampaikan oleh para pihak yang diamati dalam penelitian ini (2015, p. 71), dan kemudian peneliti mengikuti keseluruhan alur proses tersebut termasuk ketika melakukan validasi yang mencakup triangulasi data dengan beberapa referensi yang kredibel (2015, p. 71)

Salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupaya untuk fokus pada satu tema tekstual mengenai “segregasi” dalam kaitannya dengan *post-truth* sebagai dasar untuk melihat bagaimana gambaran han terbentuk di

masyarakat sebagai direpresentasikan dalam akun media sosial (Creswell, 2015, p. 72).

Data diperoleh dari dua sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah *posting* dalam akun media sosial yang menggunakan tenaga kerja asing sebagai kata kunci. Periode waktu pengamatan (observasi) dibatasi pada 27 April- 19 Mei 2018.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan lintas disiplin, baik kajian sosiologi, antropologi, komunikasi yang bertalian dengan tema etnisitas, prasangka dan komunikasi lintas budaya serta media sosial, maupun perspektif ketahanan nasional.

Teknik analisis data menyajikan analisis narasi merujuk pada konsep oposisi biner dari Levi-Strauss. Levi-Strauss menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis terutama dalam kemampuan untuk menstruktur (*structuring*) pada gejala-gejala yang dihadapinya (Eriyanto, 2013, p. 165). Struktur yang ada dalam narasi dalam media sosial misalnya merupakan struktur-struktur permukaan. Struktur permukaan merupakan struktur yang disadari oleh penuturnya, yang menggambarkan sesuatu yang ada dalam struktur dalam (*deep structure*). Struktur dalam itu sendiri merupakan yang ada di balik berbagai narasi atau cerita. Lebih jauh lagi, relasi-relasi pada struktur dalam dapat disederhanakan menjadi oposisi berpasangan (biner).

Oposisi biner merupakan aspek penting yang dianggap dapat mengungkap bagaimana manusia berpikir, dan sekaligus memproduksi makna dan memahami realitas (Culler, dalam Eriyanto, 2013, p. 166).

Dikatakan bahwa sebuah narasi selalu memiliki oposisi biner dilihat dari rangkaian dan relasi diantara kata, kalimat, gambar dan adegan suatu narasi (Eriyanto, 2013, p. 171). Makna suatu narasi tidak terlihat pada unsur yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan dari relasi diantara

unsur-unsur tersebut. Dengan membuat relasi di antara unsur-unsur dari suatu cerita, makna dari suatu cerita dapat dilihat, diketahui dan dipahami. Dari situ akan terlihat bahwasanya penulis memiliki logika, jalan pikiran dan nalarnya sendiri (Eriyanto, 2013, p. 171)

Ada tiga langkah untuk menemukan oposisi biner dari suatu narasi menurut Eriyanto (2013, pp. 171-172). Pertama adalah mencari miteme (*mytheme*) yaitu unsur terkecil dari narasi, bisa berupa kalimat, adegan, ataupun rangkaian kalimat. Tahap berikutnya adalah mencari relasi diantara miteme-miteme tersebut. Sebuah narasi memberikan pada pembacanya sebuah kisi yang hanya dapat dipahami dengan melihat pada aturan yang mendasari konstruksinya. Apa yang kemudian menjadi dasar dari konstruksinya, yaitu adalah pandangan-pandangannya mengenai dunia.

Pada bagian terakhir adalah menyusun miteme tersebut secara sintagmatik dan paradigmatis. Menyusun miteme secara sintagmatik adalah menyusun kata, kalimat dan gambar secara sekuens. Sementara menyusun miteme secara paradigmatis adalah menempatkan miteme sesuai dengan posisi dan paradigmanya dalam suatu kesatuan makna. Rangkaian antara unsur sintagmatik dan paradigmatis kemudian membentuk kumpulan relasi-relasi. Setelah itu pola yang terbentuk dari relasi sintagmatik dan paradigmatis diinterpretasikan oleh peneliti.

Temuan dan Diskusi

Sejumlah akun media sosial yang diamati, tidak hanya pada akun jajaran pimpinan dewan legislatif, melainkan juga pada mantan menteri pada kabinet sebelumnya dan juga pada sejumlah masyarakat sipil lainnya. Sejumlah akun tersebut memperlihatkan beberapa tendensi yang kurang lebih mirip, yaitu mencoba memelintir isu tenaga kerja asing pada isu dirampaskan hak masyarakat Indonesia pada dunia kerja. Perampasan hak

tersebut ditempatkan dalam konteks sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemimpin negeri ini yang tidak memiliki orientasi kerakyatan, melainkan lebih pada orientasi pemihakan pada Pemerintahan Asing, dalam hal ini Tiongkok. Dan kedua, bahwa orientasi itu dipilih sebagai bagian dari kebutuhan akan pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres 2019.

Yang menarik adalah bagaimana narasi dibangun secara strategis untuk menggiring opini keberpihakan pada kepentingan rakyat. Salah satunya diangkat oleh salah seorang pimpinan Dewan yang di dalam salah satu *posting* menyebutkan bahwa “Alih-alih berusaha memberikan perlindungan maksimal thdp tenaga kerja Indonesia... pemerintah malah kian memanjakan tenaga kerja asing ...”.

Bahkan dalam *wall*-nya ditemukan reaksi yang muncul dari jaringan sosial yang dimilikinya yang nampaknya sudah menjadi bagian dari lingkaran pendukungnya, yang mengatakan bahwa isu terorisme diangkat sebagai pengalihan atas isu yang jauh lebih krusial yaitu tenaga kerja asing.

Isu nasionalisme menyeruak justru ketika Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa nasionalisme Jokowi sudah teruji (infonews, 2018).

Posting lain menyebutkan bahwa, “Kenapa Pemerintah tidak mendahulukan bangsa Indonesia didalam merekrut ... malah Tenaga Kerja Asing Cina direkrut sebanyak 24.000 orang? Padahal Bangsa Indonesia banyak yg menganggur.”

Perhatikan bahwa ada setidaknya tiga isu yang muncul dalam kontestasi yang muncul dalam media sosial, pertama isu tentang nasionalisme, isu “Cina”. Dan isu ketiga adalah ketika Moeldoko mengakui bahwa ternyata di Morowali terdapat 2000 tenaga kerja asing (Detiknews, 27 April 2018). Dengan demikian ada isu berikutnya yaitu data.

Dalam twit yang dibuat oleh Kantor

Staf Presiden dijelaskan juga bahwa “Presiden @jokowi mengakui ... ada tenaga kerja asing yang masuk ... untuk menempati posisi-posisi khusus dan tertentu di mana kemampuannya ... dibutuhkan dan belum dapat dipenuhi tenaga lokal”. Twit tersebut dibuat sebagai respons atas pertanyaan yang muncul saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Padang, persisnya saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah wakaf di Padang.

Dalam era *post-truth*, kebenaran menjadi suatu isu besar, karena sebagaimana dijelaskan oleh Evan Davis (2018: 6) bahwa sebuah fakta ketika muncul ke hadapan publik bukan soal fakta itu sendiri, akan tetapi bagaimana fakta itu hadir sebagai pendukung atas kepercayaan kita akan sesuatu hal. Artinya bahwa kalau sebuah fakta tentang tenaga kerja asing disandingkan dengan isu “hak tenaga kerja dirampas”, maka fakta tersebut menjadi diterima daripada fakta yang disampaikan oleh kelompok lainnya yang hanya menyampaikan fakta secara netral tanpa ada sisipan subyektivitas.

Dengan demikian ketika sebuah fakta disandingkan dengan interpretasi yang berkaitan atau punya relevansi dengan kepentingan pembacanya, maka itu menjadi sebuah kebenaran yang digenggam oleh masyarakat yang membacanya. Dalam konteks *post-truth*, pernyataan Joko Widodo mengenai perlunya menyaring informasi dan tidak menelan mentah-mentah menjadi suatu hal yang tidak bermakna bagi mereka, karena bagi sekelompok masyarakat, yang mereka butuhkan bukan skema menyaring secara logis, melainkan menyeleksi informasi (Davis, 2018: 13).

Dari segi itu, terlihat bagaimana era *post-truth* menjadi ancaman besar bagi kontruksi nasionalisme. Apalagi Davis juga mengatakan bahwa fakta-fakta di dalam era *post-truth* menjadi fakta yang *banal* atau dangkal. Masyarakat yang mengonsumsi informasi tidak mencari kedalaman informasi, melainkan informasi yang dangkal dan relevan bagi kepentingannya.

Maka fenomena *post-truth* menghadirkan suatu perubahan yang dramatis dalam ruang publik, dimana isu Tenaga Kerja Asing sebagaimana disebutkan di atas sesungguhnya berkelindan dengan isu “Cina” atau Tionghoa. Perubahan istilah etnis Cina menjadi Tionghoa, yang sesungguhnya berbeda dengan Cina yang merujuk pada konsep negara Cina atau kemudian diganti menjadi Tiongkok, justru menjadi peluang untuk membangun asosiasi bahwa TKA adalah Cina, dan Cina adalah Tionghoa.

Dan sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, konstruksi asosiatif ini tidak dapat dicegah muncul dalam ruang publik adalah bahwa istilah pribumi itu sendiri menja dan berpotensi menjadi sumber dari han yang muncul dan menjadi narasi yang meluas diproduksi, dikonsumsi dan direproduksi terusmenerus dalam ruang media sosial.

Dalam konteks sebagai pejabat publik ketika melakukan fungsi reproduksi berpeluang pada terjadinya ampflikasi yang mengakibatkan sebuah narasi menjadi kuat muncul dalam benak publik.

Narasi yang muncul dalam media sosial beragam, dari yang mengasosiasikan TKA dengan Tionghoa sebagai identitas kultural yang berseberangan dengan kutub tenaga kerja domestik hingga meletakkan pribumi sebagai sebuah identitas yang diproyeksikan ke dalam ruang ekonomi-politik dengan memparalelkan ide tentang pribumi sebagai mereka yang terpinggirkan dengan adanya Perpres No. 20/2018 versus TKA dan Tionghoa. Sebagian mendasarkan narasi pada prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa dan menempatkan secara diametral pribumi dalam posisi yang positif dan bahkan etnosentrik.

Pada titik ini, pemerintahan Joko Widodo ditengarai sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kebijakan menghadirkan kemudahan bagi tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok yang berimplikasi pada menurunnya posisi tawar tenaga kerja domestik dan

meningkatnya jumlah pengangguran, dan dengan demikian narasi *post-truth* yang hadir kuat adalah menempatkan kelompok pribumi sebagai pihak yang dimarginalisasi.

Sementara kelompok tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok dalam oposisi biner ditempatkan dalam posisi sebagai pihak yang memiliki kekuatan dari segi sumber daya kapital sehingga memungkinkan mereka leluasa mendapatkan akses pada posisi-posisi strategis. Apalagi dalam perspektif ini kelompok ini melihat bahwa Presiden memberi keleluasaan secara regulatif dan dengan demikian memberikan peluang lebih besar bagi akses tenaga kerja asing pada lapangan kerja di Indonesia.

Narasi tentang “menjadi pribumi yang kuat” dikonstruksi secara sistematis. Dan bahkan narasi dikembangkan sebagai sebetulnya potensi ancaman riil tentang kepentingan perluasan ekonomi Tiongkok yang berimplikasi pada mobilisasi tenaga kerja asing dari Tiongkok yang mengalir ke Indonesia baik secara legal maupun illegal, yang berpotensi menjadi ancaman riil bagi keberlangsungan kelompok pribumi di dalam dunia kerja. Dan peluang-peluang itu dibuka oleh Presiden, sehingga kemudian berdasarkan pada narasi ini, mulai dibangun narasi tentang perlunya #Ganti presiden.

Mekanisme internalisasi dalam proses konstruksi sosial yang terjadi dikuatkan melalui narasi Pribumi versus nonpribumi yang bersandarkan pada kenyataan historis tentang basis ekonomi, sehingga pada titik ini berpotensi untuk membangun keterpecahan masyarakat melalui penguatan prasangka yang sudah ditaburkan sedikit demi sedikit dalam konstruksi pemaknaan relasi antar etnis pribumi dan nonpribumi di Indonesia.

Narasi tentang pribumi versus non pribumi yang menempatkan relasi secara tidak seimbang atau dalam perspektif yang menegasikan nilai positif dari kelompok nonpribumi semakin mendapatkan ruang yang

luas dan dibiarkan. Proses internalisasi terus berlanjut hingga waktu akan menggeser narasi tentang pribumi versus nonpribumi dan pada waktunya nanti akan mencari jalannya sendiri untuk muncul kembali dengan tekanan yang bisa jadi sama, atau barangkali juga berbeda. Seperti dapat dicermati, pasca pelantikan Gubernur DKI menarasikan isu pribumi yang kontroversial (Puspitasari, 2018) dan menghadirkan kesadaran naratif yang merupakan bagian dari konstruksi realitas sosial yang menegaskan narasi biner.

Salah satu yang menjadi catatan kritis berdasar temuan di lapangan adalah bahwa masyarakat dewasa ini berhadapan dengan kehadiran teks-teks sosial yang bukan hoaks, melainkan bersumber dari data yang kredibel dan absah. Meski demikian data tersebut tidak berarti benar, karena data diperlakukan dalam dua cara, yaitu pertama dikaitkan dengan data lain yang sebetulnya tidak berkesesuaian, tetapi diracik secara menarik supaya dianggap relevan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari teks-teks tersebut. Dan cara kedua adalah bahwa data yang kredibel dan absah diimbui dengan interpretasi yang melibatkan adanya distorsi melau proses seleksi dalam menonjolkan ide-ide tertentu. Dengan demikian potensi terjadinya segregasi masyarakat tidak didasari oleh berita bohong, melainkan lebih didasari oleh data yang sudah dipelintir untuk alasan kepentingan tertentu, dalam hal ini salah satunya adalah untuk menciptakan segregasi di tengah masyarakat dan sekaligus untuk mendelegitimasi kekuasaan presiden.

Simpulan dan Saran Simpul

Secara historis struktur masyarakat Indonesia dibangun dalam dinamika yang rentan secara sosio-kultural, dan dinamika itu sebagian dikonstruksi oleh sejarah kolonialisme Belanda. Ada narasi berbasis prasangka yang dibangun dalam arena media sosial yang menunjukkan jejak-jejak internalisasi, obyektivasi dan eksternalisasi yang berlangsung sepanjang sejarah bangsa ini.

Hadirnya teks sosial tentang tenaga kerja asing memunculkan kembali narasi tentang prasangka berbasis privilese pada kelompok etnis tertentu yang telah dikonstruksi dalam kurun waktu panjang. Narasi itu tidak hanya menyinggung kesan adanya privilese pada tenaga kerja asing sementara tenaga kerja domestik dimarginalisasi, bahkan juga menyinggung imajinasi tentang pengaruh sumber daya ekonomi kelompok CinaTionghoa-Tionghoa pada kekuasaan dan bahkan tentang bagaimana kekuasaan Presiden Joko Widodo dibangun di atas jalinan kerjasama ekonomi dengan Pemerintah Tiongkok. Dari titik itu dibangun imajinasi tentang orientasi keberpihakan pada kepentingan asing daripada tenaga kerja domestik.

Narasi tidak hanya menyinggung aspek ekonomi dan politik, melainkan juga aspek legitimasi kekuasaan, yang diketahui secara historis memiliki kerentanan untuk meledak sebagai konflik yang berpotensi dapat menjadi instrumen politik yang dimainkan pada masa Pilkada 2018 dan menjelang Pilpres 2019.

Era *post-truth* ditandai dengan hadirnya teks-teks sosial yang bersumber dari data yang kredibel dan absah, tetapi kemudian dalam praktiknya diimbui dengan interpretasi atau dikaitkan dengan data lain yang sebetulnya tidak berkesesuaian, tetapi menarik dan sesuai atau dianggap relevan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari teks-teks tersebut. Dengan demikian, *post-truth* bukanlah ditandai dengan berita bohong, karena bisa jadi beritanya benar, akan tetapi disajikan secara tidak benar, karena dikaitkan dengan fakta lain yang tidak berhubungan atau disajikan dalam kerangka interpretasi yang telah didistorsi.

Dan era *post-truth* menandai babak baru dalam terbentuknya segregasi di tengah masyarakat dengan menjadikan data sebagai basis untuk memecah belah dan menjadi potensi ancaman bagi ketahanan nasional.

Saran

Literasi media menjadi suatu kebutuhan untuk didiseminasikan ke dalam ruang publik melalui media sosial, dengan menampilkan kekayaan sejarah pertautan bangsa Indonesia yang diwarnai dengan kerukunan dan keterbukaan para bapak bangsa dan mereka yang berjasa mendorong Indonesia menjadi negara yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan demi mencapai tunggal ika berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Era *post-truth* merupakan suatu tantangan yang perlu melibatkan kreativitas beragam pemangku kepentingan terutama para pegiat media sosial bekerjasama dengan akademisi, dan pemerintah dengan segenap aparatur yang bekerja dalam ranah komunikasi publik seperti Kemkominfo dan KPI serta kelompok masyarakat madani. Kreativitas dalam hal merangkai pesan-pesan tekstual mencakup kata, gambar dan video yang dapat merangsang kembali hasrat untuk melihat Indonesia dan nasionalisme tidak hanya pada tataran sesuai dengan kepentingan individual atau kelompok demi bertahannya Indonesia.

Referensi

- Anderson, Benedict. 1999. *Komunitaskomunitas Imajiner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist
- Beerkens, Eric. 2008. INDONESIA: Students and the rise and fall of Suharto. 20 January 2008 Issue No:12 (<http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20080117160839331>)
- Creswell, J. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daud, Ameidyo. 2018. "Jokowi Luruskan Isu Tenaga Kerja Asing saat Kunjungan ke Padang", katadata, 22 Mei 2018. <https://katadata.co.id/berita/2018/05/22/jokowi-luruskan-isu-tenaga-kerja-asing-saatkunjungan-ke-padang>
- Davis, Evan, 2017. *Post-Truth: Why we have reached peak bullshit and what we can do about it*. UK: Little, Brown.
- Detiknews. 2018. "Moeldoko Akui Ada Ribuan Buruh China di Morowali" https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-3991601/moeldoko-akui-adaribuan-buruh-china-dimorowali?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=detikfinance&utm_campaign=cmssocmed
- Dhakidae, D. 1991. "The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry", *Dissertation* pada Cornell University, di Department of Government, Ilmu Politik, Ithaca, New York
- Eriyanto, 2013. Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haryanto, R, 2015. "Analisa Wacana Anti Cina dalam Pemberitaan Harian Kompas dan Republika Menjelang Kerusuhan Mei 1998". Skripsi pada FISIP Universitas Indonesia
- Hawdon, J, Agnich, LE dan Ryan J. 2013 "Media Framing of a Tragedy: A Content Analysis of Print Media Coverage of the Virginia Tech Tragedy" https://www.researchgate.net/.../268515906_Media_Framing_of_a_Tragedy_A_Cont...
- Hill, D dan Sen, K. 2005. *The Internet in Indonesia's New Democracy*. London: Routledge.
- "Soal TKA Asing, Moeldoko Tegaskan Nasionalisme Jokowi Teruji" April 27, 2018 <http://www.infopresiden.com/2018/04/soaltka-asing-moeldoko-tegaskan.html?m=1>
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan

- Obor Indonesia kompas.com. 2018. Polisi Sudah Tangkap 14 Anggota Grup Muslim Cyber Army. Feb 27, 2018
- Mydans, Seth. 1998. "The Fall of Suharto: the overview, Suharto, besieged, steps down after 32-year rule in Indonesia", *The New York Times*. May 21, 1998
- Pitoko, Ridwan Aji. 2018. "Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing" (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerjaasing>) 30 April 2018
- Puspitasari, 2018. "Binary Opposition in Narration of "Native" in Social Media". *Jurnal Komunikasi ISKI*. Vol 3. No. 1, June 2018
- Puspitasari, 2012. "Kontestasi Pemaknaan Teks Pluralisme dalam Arena Media Sosial". *Disertasi pada Universitas Indonesia*.
- Severin, WJ dan Tankard, JW. 2005. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Jakarta
- Shoemaker, P dan Reese, S (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. USA: Longman
- Sobur, A, 2001. *Analisis Teks Media: suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Ting-Toomey, S dan Chung, L. 2011. *Understanding Intercultural Communication*. USA: Oxford University Press